

LAPORAN MONEV PENGADUAN MASYARAKAT SEMESTER II 2025



**BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menindaklanjuti tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan prima Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar sebagai bagian dari unsur penyelenggara Negara yang bebas KKN terkait tuntutan masyarakat terhadap Transparansi dan akuntabilitas dan Akuntabilitas Kinerja, maka Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar telah dan terus melakukan Reformasi Birokrasi di lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar baik menyangkut aspek instrumental, Struktural dan kultural, agar kedepan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar lebih dapat meningkatkan kinerjanya secara optimal dan profesional, proaktif, peka dan peduli serta dinamis, sehingga Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar diharapkan dapat memberikan pelayanan Prima secara berhasil dan berdaya guna.

Sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 18 ayat (c) bahwa masyarakat berhak mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan. Kondisi-kondisi ini memerlukan perhatian serius dalam upaya memperbaiki manajemen pelayanan pengaduan pelayanan publik. Fokus Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang antara lain adalah dalam upaya penyempurnaan pelaksanaan pengaduan masyarakat. Laporan Pelaksanaan dan Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat di lingkup BPSPL Makassar ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pelaksanaan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar.

Maros, Januari 2026
Kepala Balai Pengelolaan Sumber
Daya Pesisir dan Laut Makassar



A. Muh. Ishak Yusma, S.Kel, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Dasar Hukum	8
E. Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan	8
F. Saluran Pengaduan Masyarakat BPSPL Makassar.....	10
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	11
A. Jumlah Pengaduan Periode Ini	11
B. Tindak Lanjut Pengaduan Periode ini.....	11
C. Evaluasi Penanganan Pengaduan Periode Ini	12
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	16
A. Penilaian/perbandingan Rencana Kerja dengan pelaksanaan kegiatan	16
B. Permasalahan	17
C. Saran perbaikan	17
BAB IV TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA	18
A. Saran atau Rekomendasi Selanjutnya	18
B. Tindak Lanjut Hasil Monev.....	18
BAB V PENUTUP.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pengaduan Masyarakat yang masuk ke BPSPL Makassar Periode Semester II Tahun 2025	11
Tabel 2. 2 Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Semester 1 Tahun 2025	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan di BPSPL Makassar.....	9
Gambar 3. 1 Flowchat rencana kerja untuk Pengaduan masyarakat.....	35
Gambar 4. 1 Tindak lanjut Sosialisasi Semester 1	37

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik dikategorikan baik apabila memenuhi persyaratan, diantaranya adalah perubahan pola pikir penyelenggara layanan, sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan masyarakat, memenuhi prinsip kejelasan hak dan kewajiban antara penyedia layanan dan penerima layanan dan adanya umpan balik (*feedback*) yang jelas dari penerima layanan kepada penyedia layanan melalui mekanisme penanganan pengaduan masyarakat .

Ketidakjelasan mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat sering menjadi penyebab kesalahpahaman atau ketidakmengertian. Hal ini sering merupakan penyebab adanya keluhan, kritik dan saran sebagai upaya menginginkan perbaikan dalam pelayanan justru disampaikan dengan cara "kontra produktif" dan pada gilirannya akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara masyarakat dan instansi pemberi layanan.

Apabila kondisi demikian tidak segera diantisipasi dengan tindakan nyata dan konkrit maka dapat menimbulkan gejolak yang dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan. Keterkaitan antara konsep *good -governance* (tata pemerintahan yang baik) dengan konsep *public service* (pelayanan publik) tentu sudah cukup jelas logikanya.

Terdapat fakta bahwa betapa pentingnya pelayanan publik adalah keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubah *mindset* para birokrat dari *bermental penguasa* menjadi birokrat yang *bermental pelayan* masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan. penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan, serta penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik, termasuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di samping

sebelumnya telah terbit Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Kedua kebijakan tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan utama Monitoring dan Evaluasi laporan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat adalah menetapkan kerangka kerja untuk mengukur dan memperbaharui kondisi pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat, juga memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat sudah dilaksanakan secara efektif. Pemantauan dan evaluasi program pelaksanaan penanganan pengaduan secara umum bertujuan untuk mengetahui masalah dan kendala organisasi, sekaligus mencari solusi dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan program kegiatan sektor pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat di BPSPL Makassar, baik secara internal maupun eksternal dalam periode satu tahunan (Jangka pendek). Tujuan umum penanganan pengaduan adalah menyediakan sistem, prosedur, dan mekanisme yang memungkinkan segala keluhan ataupun protes dari semua pihak dapat terkelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan gejolak dan mengganggu kelancaran jalannya kegiatan suatu institusi pemerintah.

Tujuan operasional pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat adalah untuk mengetahui secara dini dan berkala masalah dan kendala dalam melaksanakan program/kegiatan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat pada Laporan Monev BPSPL Makassar dan memberikan alternatif solusinya. Sebagaimana tujuan monitoring dan evaluasi yang disampaikan diatas, maka ditetapkan sasaran : Tersedianya laporan pelaksanaan pengaduan masyarakat secara menyeluruh, masalah dan kendala

proses. Tersedianya alternatif pemecahan masalah dan kendala dalam melaksanakan program kegiatan penanganan pengaduan masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan ini terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan pengaduan terhadap jenis ikan yang dilindungi di Wilayah Kerja, meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan

D. Dasar Hukum

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di samping sebelumnya telah terbit Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Kedua kebijakan tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

Permen KP no 44 tahun 2018 dan Kepmen kelautan dan Perikanan nomor 37/KEPMEN-KP/SJ/2021 tentang tim pengaduan, admin koordinator, dan admin penghubung di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu terdapat pula Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 24 TAHUN 2021 tentang Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I Dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

E. Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan

Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan di Lingkungan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar dengan nomor BPSPL/OT.300/III/2019 meliputi:

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pengadu (Masyarakat / Pegawai)	Kepala Balai/Kepala UOT	Tim Penanganan Pengaduan	Admin Penghubung	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Menerima pengaduan melalui lisin/Email/SMS Gateway/Whatsapp/Kotak Pengaduan/Website/Surat Pengaduan/Web Lapor/ Web Whistleblower/Facebook/Instagram	MULAI		2		Form Pengaduan (Nama, No Handphone, Substansi Pengaduan, Pihak Yang Terlibat, Waktu dan Lokasi)	5 menit	Form Pengaduan	Pengaduan juga bisa disampaikan kepada Kepala Balai dan Admin Penghubung
2	Melakukan Pencatatan dan administrasi terhadap Pengaduan Masyarakat pada laman www.lapor.go.id					Komputer/Tab Pengaduan dan Koneksi Internet	10 menit	Nomor tracking ID Pengaduan Masyarakat di database website : www.lapor.go.id	dilakukan oleh admin penghubung
3	Memberikan Laporan berkas pengaduan masyarakat kepada ketua Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat BPSPL Makassar					Print Laporan Pengaduan di laman www.lapor.go.id	2 Jam	Pengaduan diteruskan kepada instansi terkait	Berdasarkan hasil evaluasi koordinator penghubung lewat
4	Penyampaian kewenangan penanganan pengaduan kepada Tim Penanganan BPSPL Makassar untuk ditindaklanjuti					Hasil penetapan kewenangan penanganan dan/atau tindak lanjut pengaduan	3 hari	Penyusunan hasil penetapan kewenangan penanganan dan/atau tindak lanjut pengaduan kepada Tim Penanganan Pengaduan BPSPL Makassar dapat dalam bentuk Surat Tugas	Berdasarkan hasil evaluasi koordinator penghubung lewat aplikasi
5	Menelaah dan melakukan pengumpulan bukti dan Keterangan serta bukti terkait pengaduan masyarakat, melakukan pengecekan layanan jika diperlukan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat					Penanganan pengaduan	2 hari	Dokumentasi, Persetujuan	apabila terkait dengan wewenang instansi lain
6	Pembuatan laporan hasil tindak lanjut pengaduan yang ditunjukkan kepada inspektur Jenderal dengan memuat kesimpulan dan rekomendasi oleh BPSPL Makassar dan menginput ke website lapor				SELESAI	Hasil tindak lanjut pengaduan	5 menit	Laporan Penanganan Pengaduan serta Rekomendasi di website lapor dan hasil tindak lanjut diteruskan ke pelapor	melalui aplikasi

Gambar 1. 1 Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan di BPSPL Makassar

F. Saluran Pengaduan Masyarakat BPSPL Makassar

Whatsapp	: 0813 691 33 691
Website	: https://kkp.go.id/djprl/bpsplmakassar/page/507-layanan-pengaduan
Email	: pengaduan.bpsplmakassar@kkp.go.id
Portal lapor	: www.lapor.go.id
Facebook	: https://web.facebook.com/bpspl.makassar
Twitter	: @bpspl_makassar
Instagram	: https://www.instagram.com/bpsplmakassar

Kotak Pengaduan : Kantor BPSPL Makassar Jl. Makmur Dg.Sitakka No.129 Maros

Saluran resmi pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Website dengan laman ; www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;
2. Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;
3. Surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id;
4. Telepon dan whatsapp dengan nomor 0811989011;
5. Surat nonelektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110

Tim Penanganan Pengaduan UPT BPSPL Makassar

- 1 Andi Jaya, Kepala Subbagian Umum/ Ketua
- 2 Muhammad Fadly, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama/ Wakil Ketua
- 3 Arrizal Khakim, Analis Perencanaan/Sekretaris
- 4 A. Syahrudin, Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir /Anggota
- 5 Jupri, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda/Anggota
- 6 Fela Pritian Cera, Pengelola Ekosistem Laut danPesisir Ahli Pertama/Anggota
- 7 Dimas Wahyu Anggara, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama/Anggota
- 8 A. Wahyu Oramahi Yusuf AT, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama/Anggota
- 9 Muhammad Fadly, PELP Muda (Admin UPP UPT

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Jumlah Pengaduan Periode Ini

Pada Periode Semester II 2025 ini, terdapat 3 pengaduan yang masuk ke Tim Pengaduan BPSPL Makassar. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Pengaduan Masyarakat yang masuk ke BPSPL Makassar Periode Semester I Tahun 2025

Bulan	Nomor	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<i>Juli</i>	<i>1</i>	-	Whatsapp	24 July 2025	Aspirasi	Informasi Paus Sperma Terdampar di Desa Baturoro, Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene dari masyarakat	Nova Labora
Agustus	<i>Nihil</i>						
September	<i>Nihil</i>						

Oktober		4,45261E+13	Langsung	30 October 2025	Permohonan Informasi	PT. Luwuk Industrial Indonesia berkonsultasi terkait permohonan KKPRL yang akan diajukan dan meminta gambaran dokumen yang diajukan seperti apa	Rizki
November	Nihil						
Desember		4,45261E+13	Langsung	7 Desember 2025	Permohonan Informasi	PT. Bosowa energi punagaya, Kabupaten Jeneponto melakukan audiensi terkait dengan ijin ALSE yang harus diurus perusahaan, dan menindaklanjuti hasil Giat PSDKP Satwas Bitung terkait kegiatan Pengawasan Pelanggaran Perijinan KKPRL dan ALSE	Ilham, PT. Bosowa Energi

B. Tindak Lanjut Pengaduan Periode ini

Tindak lanjut Penanganan Pengaduan Pada periode Semester II 2025 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Semester II Tahun 2025

Bulan	Nomor	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjuti		Keterangan
								Verifikasi	Penelaah	Uraian	Status	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Juli	1	-	Whatsapp	24 July 2025	Aspirasi	Informasi Paus Sperma Terdampar di Desa Baturoro, Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene dari masyarakat	Nova Labora	Fadly	Andi Jaya	Pada hari Kamis, 24 Juli 2025, sekitar pukul 12.55 WITA, BPSPL Makassar menerima informasi melalui media sosial mengenai adanya mamalia laut terdampar di Desa Baturoro, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Respon Cepat BPSPL Makassar segera melakukan koordinasi dengan PSDKP Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan data yang dihimpun, mamalia laut yang terdampar merupakan jenis Paus Sperma (Sperm whale) dengan ukuran panjang sekitar ±11,22 meter dan lebar ±1,74 meter. Paus tersebut dilaporkan terdampar pada pukul 02.30 WITA dini hari. Saat ditemukan, tidak tampak luka pada tubuh paus. Namun, ketika tim PSDKP tiba di lokasi, ditemukan adanya aktivitas masyarakat yang mengambil gigi paus, sehingga menyebabkan keluarnya darah dan mencemari perairan sekitar. Pihak PSDKP segera memberikan teguran dan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur penanganan mamalia laut terdampar, serta pentingnya untuk tidak mengambil bagian tubuh hewan tersebut. Setelah berkoordinasi dengan masyarakat, disepakati bahwa bangkai paus akan ditangani dengan cara penenggelaman. Namun, pelaksanaan tindakan ini menunggu waktu pasang laut tertinggi untuk memudahkan proses penarikan ke perairan yang lebih dalam. Pada hari Jumat, pukul 06.04 WITA, proses	Selesai di Tindak Lannjuti	

Bulan	Nomor	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindakanlanjutan		Keterangan
								Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
										penarikan bangkai paus dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dengan bantuan masyarakat setempat. Penarikan ke tengah laut menggunakan lima unit armada katinting milik warga. Berat paus yang diperkirakan mencapai 4 ton membuat proses penenggelaman cukup sulit. Untuk mengatasi hal tersebut, Pokmaswas berinisiatif menyayat bagian perut guna mengantisipasi pembentukan gas di dalam tubuh paus, sehingga bangkai dapat tenggelam. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan ini meliputi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan PSDKP Provinsi Sulawesi Barat.		
Agustus	Nihil											
September	Nihil											
Oktober	1	4,45261E+13	Langsung	30 October 2025	Permohonan Informasi	PT. Luwuk Industrial Indonesia berkonsultasi terkait permohonan KKPRL yang akan diajukan dan meminta gambaran dokumen yang diajukan seperti apa	Rizki	Fadly	Andi Jaya	Tim Pelayanan Perijinan Pemanfaatan Ruang Laut telah mensosialisasikan regulasi terkait permohonan ijin KKRPL serta standar dokumen yang dibutuhkan. Selain itu BPSPL Makassar melakukan pengecekan kesesuaian ruang di area permohonan melalui webgis Layarpinisi.id	Selesai di Tindak Lanjuti	-
November	Nihil											

C. Evaluasi Penanganan Pengaduan Periode Ini

Dalam pelaksanaan penanganan pengaduan semester I Tahun 2025 tidak terdapat kendala dan berjalan dengan lancar.

D. Monitoring dan Evaluasi Terhadap SDM/Petugas Penanganan Pengaduan

Pada periode Semester II telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap SD/Petugas Pengaduan dengan menggelar Forum Konsultasi Publik dalam Review Standar Pelayanan Publik. Forum ini adalah sarana menjangkau aspirasi sekaligus Langkah monitoring dan evaluasi terhadap petugas pelayanan termasuk petugas penanganan pengaduan BPSPL Makassar. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan kabupaten/kota se Sulawesi, akademisi, LSM, media serta pelaku usaha. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 di Kantor BPSPL Makassar secara hybrid.



Kegiatan Forum Konsultasi Publik sebagai sarana evaluasi Petugas Penanganan Pengaduan BPSPL Makassar

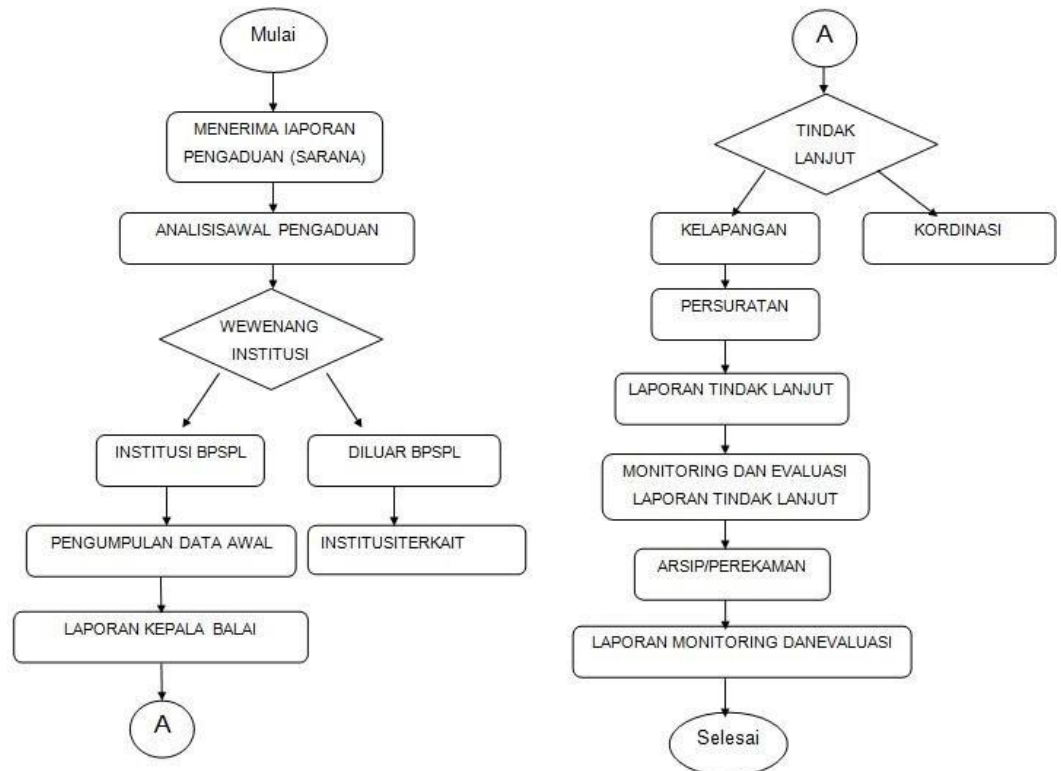
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. *Penilaian/perbandingan Rencana Kerja dengan pelaksanaan kegiatan*

A.1. Rencana kerja

Rencana kerja terkait pengaduan masyarakat dapat dilihat pada

Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Flowchat rencana kerja untuk Pengaduan masyarakat

A.2. Perbandingan Rencana dan Pelaksanaan

Dari pelaksanaan kegiatan terkait laporan pengaduan masyarakat Semester I sudah sesuai dengan rencana kegiatan yang ada.

B. *Permasalahan*

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan tindak lanjut laporan pengaduan periode ini.

C. *Saran perbaikan*

Rekomendasi untuk periode ini adalah agar tim pengaduan masyarakat di periode selanjutnya untuk melakukan penyegaran anggota tim dikarenakan perubahan nomenklatur menjadi Balai Penataan Ruang Laut Makassar dan di bawah unit Eselon I Ditjen Penataan Ruang Laut.

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA

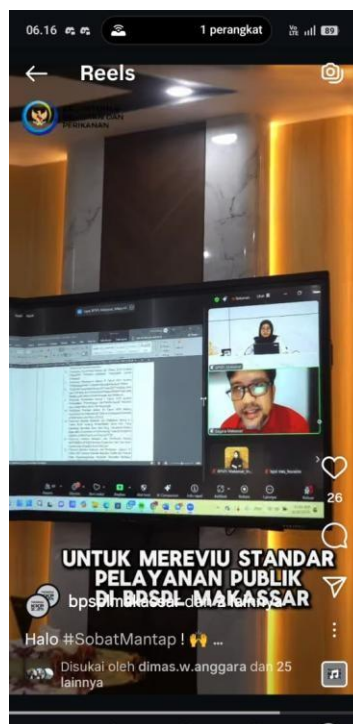
A. *Saran atau Rekomendasi Selanjutnya*

Rekomendasi tim pengaduan masyarakat di periode selanjutnya memasukkan materi terkait Pengelolaan Pengaduan (Technical Note for Grievance Redress Mechanisms) Oceans for Prosperity Project – LAUTRA Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Indonesia Hal ini dikarenakan pada periode semester 2 kedepan akan dilaksanakan kegiatan LAUTRA.

B. *Tindak Lanjut Hasil Monev*

Sebagai tindak lanjut dari saran atau rekomendasi sebelumnya, Tim Penanganan Pengaduan BPSPL Makassar telah Konsultasi Publik dimana pada kegiatan tersebut turut disosialisasikan sarana pengaduan BPSPL Makassar. Adapun Gambaran kegiatan dapat diakses melalui tautan berikut :

<https://www.instagram.com/reel/DLkR0FWztml/?igsh=MW9rYWkxNGM3OG0cQ==>



Gambar 4. 1 Tindak lanjut Sosialisasi Semester 2

BAB V PENUTUP

Pada periode Semester II 2025, terdapat **3 (Tiga)** pengaduan masyarakat yang masuk. Pada periode kedepan diharapkan dilakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai adanya sarana pengaduan masyarakat di BPSPL Makassar.

BUKTI DUKUNG APLIKASI LAPOR.GO.ID

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar

☆☆☆☆☆ 0

LIHAT TOTAL

PEMANTAUAN

Riwayat Intervensi

LAPORAN

Kelola

Terdisposisi

Arsip

Terlempar

Salinan

Selesai

Terpilih

Sukses

Laporan Terpilih & Sukses

Statistik - Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) ...

PEMANFAATAN DATA PENGELOLAAN LAPORAN PENGGUNA

Instansi: Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar

Periode Laporan Masuk: 01/01/2025 - 07/31/2025

Hitung Laporan Form Manual: ☒

SUBMIT

Nama Instansi: Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar

Nomor SK: -

Terakhir Kali Dilihat: Instansi belum mengupload file SK
2025-07-30 22:40:13

Rekapitulasi Kinerja

Belum Terverifikasi	Belum Ditindaklanjuti	Proses	Selesai	Tunda	Arsip	Total (Tanpa Arsip dan Tunda)	%TL	RTL	RHP	RV
0	0	0	5	0	0	5	100	1	0	1

Pengelolaan Laporan Masuk

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar

☆☆☆☆☆ 0

LIHAT TOTAL

PEMANTAUAN

Riwayat Intervensi

LAPORAN

Kelola

Terdisposisi

Arsip

Statistik - Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) ...

PEMANFAATAN DATA PENGELOLAAN LAPORAN PENGGUNA

Pengelolaan Laporan Masuk

Kategori	Nilai
Laporan Belum Terverifikasi	0
Terdisposisi Belum Ditindaklanjuti	0
Terdisposisi Sedang Diproses	0
Terdisposisi Selesai	5
Laporan Tertunda	0
Laporan Arsip	0
Total	5

Sumber Laporan

Sumber	Nilai
Facebook	1
Tatap Muka	1
Whatsapp	3
Total	5

Klasifikasi Laporan

Kategori	Nilai
null	5
Total	5

Ke Atas

